

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kegiatan perdagangan di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya - Majapahit, dilanjutkan pada zaman kerajaan Islam. Era ini surut dengan datangnya para pedagang Eropa yang kemudian menjajah. Ini diikuti oleh kebangkitan kedua yang ditandai dengan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1964 dan kemudian Peraturan Pemerintah No. 1 dan 2 tahun 1969 dikukuhkan. Pada era itu, Perusahaan Pelayaran Nasional berjaya karena kontribusi kapal Pelayaran Niaga Nasional terhadap pembangunan negara dengan penerapan asas cabotage dalam operasi pelayaran di Indonesia. oleh perusahaan pelayaran nasional yang menggunakan kapal berbendera Indonesia oleh pemerintah. Sedangkan pelayaran luar negeri merupakan kerjasama antara perusahaan pelayaran nasional dengan perusahaan pelayaran asing berdasarkan prinsip pembagian yang adil dalam pengangkutan kargo menurut konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1975. Namun era itu telah surut karena berbagai kebijakan scrapping kapal melalui Keputusan Menteri No. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 dan Paket Nopember 1988 dan diakhiri dengan UU No. 1 Tahun 1992.

Kebangkitan pelayaran Indonesia di era milenium ketiga ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkatan Laut dan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, yang dilanjutkan dengan pembahasan RUU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Dan pada tanggal 8 Mei 2008 berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai pengganti Undang-Undang No. 21 Tahun 1992, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 diharapkan dapat mengakomodir atau mewakili kepentingan semua pihak yang terkait dengan pelayaran, untuk

mendukung sistem. ketahanan pangan nasional, dan memiliki visi ke depan agar pelayaran nasional dapat berjaya kembali. Tentunya didukung dengan kebijakan pelabuhan yang tepat, keselamatan dan keamanan maritim. Secara historis, secara empiris, terbitnya Undang-Undang No 17 Tahun 2008 seharusnya menjadi kebangkitan pelayaran nasional untuk menjadi master di laut kita sendiri. (A. Edy Hidayat N 2009).

Dengan hal tersebut menyebabkan munculnya jasa dan menimbulkan persaingan di bidang pelayaran. Hal ini memacu peningkatan kualitas pelayanan atau penyediaan fasilitas yang optimal kepada pengguna jasa di bidang jasa. Karena peningkatan arus barang yang besar ke kawasan pelabuhan, perusahaan pelayaran membuka agen baru di setiap pelabuhan dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menangani kapal-kapal bukan milik. Dalam hal ini PT. Ship Agent Indonesia bertindak sebagai agen yang mengurus kedatangan dan keberangkatan *Clearance In* dan *Clearance Out* kapal.

Mengingat jasa keagenan memiliki peranan yang sangat besar dalam kegiatan pelayanan, maka penulis tertarik untuk mengetahui kegiatan keagenan dalam pengelolaan *Clearance In* dan *Clearance Out* pada PT. Ship Agent Indonesia, Marunda, Jakarta Utara, untuk itu penulis memilih judul **“PROSEDUR CLEARANCE IN DAN CLEARANCE OUT KAPAL AKRA 80 MILIK PT. AKR SEA TRANSPORT OLEH PT. AGEN KAPAL INDONESIA DI PELABUHAN MARUNDA – JAKARTA UTARA“**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam hal pelayanan kapal yang dilakukan oleh agen, perusahaan keagenan selalu mengalami berbagai kendala dan masalah. Baik dalam pelayanan kapal maupun dalam mengikuti prosedur serta mengingat obyek yang luas, sementara jadwal prada yang singkat untuk itu penulis membatasi masalah pada :

1. Langkah – Langkah apa aja saat proses *Clearance In* dan *Clearance Out* pada kapal AKRA 80 di PT. Ship Agent Indonesia ?
2. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses *Clearance In* dan *Clearance Out* pada kapal AKRA 80 di PT. Ship Agent Indonesia ?
3. Pihak-pihak apa saja yang terkait dalam proses *Clearance In* dan *Clearance Out* pada kapal AKRA 80 di PT. Ship Agent Indonesia ?
4. Hambatan apa saja yang dialami dalam proses *Clearance In* dan *Clearance Out* pada kapal AKRA 80 di PT. Ship Agent Indonesia ?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Pemahaman mengenai permasalahan didunia pelayaran dan perkapalan telah penulis peroleh secara teoritis dibangku perkuliahan dan pada lingkungan Praktek Darat (Prada) yang telah di jalani penulis. Dengan demikian penulis telah mendapatkan gambaran mengenai permasalahan - permasalahan yang ada. Dan bentuk nyata dari teori-teori tersebut penulis tuangkan dalam Karya Tulis ini.

Pelaksanaan Prada ini penulis ingin membandingkan dan mempraktekan antara teori – teori yang telah didapat dalam perkuliahan maupun di studi kepustakaan dengan keadaan yang dilaksanakan dalam praktek darat oleh perusahaan tersebut, sehingga penulisan ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah proses *Clearance in* dan *Clearance Out* pada kapal AKRA 80 di PT. Ship Agent Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses *Clearance In* dan *Clearance Out* pada kapal AKRA 80 di PT. Ship Agent Indonesia.
3. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terkait dalam proses *Clearance In* dan *Clearance Out* pada kapal AKRA 80 di PT. Ship Agent Indonesia
4. Untuk Mengetahui Hambatan yang dialami dalam proses *Clearance In* dan *Clearance Out* pada kapal AKRA 80 di PT. Ship Agent Indonesia.

Untuk mendapatkan gambaran tentang dunia pelayaran khususnya bagian keagenan, maka penulis mengharapkan dapat membawa kegunaan dari paraktek ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca

Supaya pembaca mendapatkan informasi dan data serta sebagai masukan dan sumber inspirasi untuk mengevaluasi dalam menentukan kegiatan demi mencapai perubahan yang positif dan bermanfaat bagi pembaca.

2. Bagi Institusi

Dalam hal ini akademi akan memperoleh gambaran yang nyata tentang kegiatan keagenan kapal serta menamah referensi di Akademi dan juga mendapatkan data tertulis yang lengkap mengenai perkembangan dunia pelayaran, perniagaan serta sebagai bahan informasi yang dapat diberikan taruna taruni nantinya.

3. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan program Diploma Tiga Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan Unimar Amni Semarang.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pengaman sehingga bermanfaat dalam dunia kerja di masa depan.
- c. Sebagai wadah bagi Taruna untuk menuangkan ide serta gagasan tentang hal yang telah dipelajari pada saat melaksanakan Prada.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

memberikan Sistematika penulisan penulis berusaha untuk gambaran-gambaran secara garis besar atas penulisan karya tulis. Adapun sistematika penulisan yang akan dituangkan dalam karya tulis adalah sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Penulis memaparkan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

**BAB 2            TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi teori – teori yang digunakan dalam penyusunan karya tulis. Baik teori berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah maupun media cetak dan *online*.

**BAB 3            METODE PENGUMPULAN DATA**

Pada bab ini dibahas mengenai metode pengamatan penulis. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah jenis dan sumber data dan metode pengumpulan data.

**BAB 4            PEMBAHASAN DAN HASIL**

Bab ini akan membahas tentang langkah-langkah *Clearance In* dan *Clearance Out* kapal, dokumen – dokumen kapal, Pihak – Pihak yang terkait di pelabuhan, dan hambatan-hambatan yang dialami pada saat proses *Clearance In* dan *Clearance Out*.

**BAB 5            PENUTUP**

Bab ini berisi Kesimpulan serta Saran-saran penulis dalam Prosedur *Clearance In* Dan *Clearance Out* kapal AKRA 80 di PT. Ship Agent Indonesia Jakarta. Penulisan karya tulis ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran - lampiran yang telah diambil selama pelaksanaan praktek.